

***REDESIGN* KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN
DI KABUPATEN PEMALANG PASCA TERBITNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Strata – 2

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik



Disusun Oleh :

MIRZA AGUS FAISHAL

NIM. 14020121420020

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mirza Agus Faishal
NIM : 14020121420020
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya susun dengan judul:

***REDESIGN* KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DI
KABUPATEN PEMALANG PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program magister administrasi publik ini ataupun pada program lainnya serta bukan merupakan plagiat dari tesis atau karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, Juni 2024

Pembuat,



Mirza Agus Faishal

HALAMAN PENGESAHAN

REDESIGN KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Dipersiapkan dan disusun oleh

MIRZA AGUS FAISIAL,

14020121420020

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 28 Juni 2024

Susunan Tim Penguji

KETUA PENGUJI/PEMBIMBING I



Prof. BUDI SETIYONO, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D

NIP. 19711011 199702 1 001

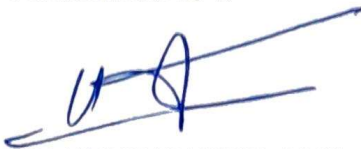
PENGUJI I



Dr. AUGUSTIN RINA HILRAWATI, M.Si

NIP. 19670815 199401 2 001

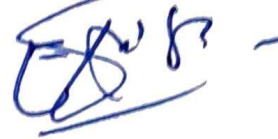
PEMBIMBING II



Dr. A.P. TRI YUNININGSIH, M.Si

NIP. 19670602 199203 2 001

PENGUJI II



Prof. Dr. ENDANG LARASATI SETIANINGSIH, M.S

NIP. 19570618 198303 2 001

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
Memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP)

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro



Dr. Dra. AUGUSTIN RINA HILRAWATI, M.Si

NIP. 19670815 199401 2 001

MOTTO

“Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.”

-Qs. Al-Hujurat:15-

"Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik daripada pengetahuan dan kesabaran."

-Nabi Muhammad SAW-

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha."

-BJ. Habibie-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “***Redesign* Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Di Kabupaten Pemalang Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah**”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) dalam bidang Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran, koreksi, dan masukan untuk perbaikan dan peyempurnaannya. Dengan tersusunnya tesis ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingannya dari masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si** selaku Rektor universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Dr. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin**, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
3. Bapak **Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin, Ph.D** selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun tesis.
4. Ibu **Dr. A.P. Tri Yuniningsih** selaku Ketua Departemen Administrasi Publik yang sekaligus Dosen Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun tesis
5. Ibu **Dr. Augustin Rina Herawati, M.Si** selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro sekaligus penguji pertama dalam ujian tesis.

6. Ibu **Prof. Dr. Endang Larasati Setianingsih, M.S** selaku penguji kedua dalam ujian tesis.
7. Kepada seluruh narasumber dari Pemerintah Kabupaten Pemalang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan wawancara dan observasi di lapangan.
8. Kepada kedua orang tua dan adik-adik saya yang turut mendukung dan memberikan doa.
9. Kepada istri tercinta **Wanda Tahta Ayu Larasati** yang selalu memberikan motivasi dan rasa cinta terhadap semua harapan dan cita-cita saya.
10. Teman-teman seperjuangan **Magister Administrasi Publik (MAP) Angkatan 56** terimakasih atas dukungan, semangat dan semuanya.
11. Semua pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan tesis ini hingga akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Amin.

Semarang, Juni 2024

Mirza Agus Faishal

ABSTRAK

Judul : *Redesign* Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan di Kabupaten Pemalang Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Nama : Mirza Agus Faishal

NIM : 14020121420020

Program Studi : Magister Administrasi Publik

ABSTRAK

Kebijakan alokasi anggaran kelurahan merupakan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kelurahan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat pemerintahan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat kelurahan. Dalam implementasinya, kebijakan alokasi anggaran di Kabupaten Pemalang memperhatikan kebutuhan spesifik setiap kelurahan, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, dan jumlah RT dan RW. Proses penyaluran dana melibatkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan studi kasus di Kabupaten Pemalang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa design kebijakan alokasi anggaran kelurahan di Kabupaten Pemalang tidak tepat berdasarkan teori Birkland, 2011, dari 5 elemen hanya 1 yang bisa dikatakan tepat yaitu *the target of the policy*. Pada implementasinya dalam pengalokasian anggaran kelurahan tidak mempertimbangkan komponen penyusun alokasi anggaran, hal tersebut ditunjukkan tidak linearnya alokasi anggaran terhadap komponen penyusun berdasarkan analisis korelasi *pearson*. Sehingga usulan *redesign* dari penelitian ini adalah memberikan indeks kewilayahan berdasarkan komponen penyusun dan alokasi anggaran yang sudah diamanatkan.

Kata Kunci: *Redesign* Kebijakan, Alokasi Anggaran Kelurahan, Keuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	17
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	17
1.2.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.5 Landasan Teori	18
1.5.1 Penelitian Terdahulu	18
1.5.2 Administrasi Publik	23
1.5.3 Kebijakan Publik.....	26
1.5.3.1 Teori Analisis Kebijakan Publik.....	27
1.5.3.2 <i>Design</i> Kebijakan Publik.....	29
1.5.4 Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Nasional	32
1.5.4.1 Sejarah Alokasi Anggaran Kelurahan	34
1.5.4.2 Indikator Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan .	35
1.6 Kerangka Pemikiran.....	37
1.7 Metode Penelitian.....	39
1.7.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	39
1.7.2 Jenis Penelitian	39
1.7.3 Fenomena Penelitian.....	40
1.7.4 Sumber Data	41
1.7.5 Pemilihan Informan	42
1.7.6 Instrumen Penelitian	44
1.7.7 Teknik Pengumpulan Data.....	44
1.7.8 Teknik Analisis Data	45
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	49
2.1 Pembentukan Kabupaten Pematang	49
2.2 Data Geografis Wilayah	49

2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang	50
2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pemalang	53
2.5 Gambaran Umum Kelurahan di Kab. Pemalang.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN.....	58
3.1 <i>Design</i> Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan Kab. Pemalang ...	59
3.2 Alokasi Anggaran Kelurahan Berdasarkan Perbup 32/2019	82
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	88
4.1 Analisis <i>Policy Design</i> Alokasi Anggaran Kelurahan.....	88
4.2 <i>Redesign</i> Alokasi Anggaran Kelurahan Kab. Pemalang	98
BAB V PENUTUP	111
5.1 Kesimpulan.....	111
5.3 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Unsur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2
Tabel 1.2 Data Rincian DAU Tambahan Kabupaten/Kota Tahun 2019.....	5
Tabel 1.3 Data Rincian DAU Tambahan Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	6
Tabel 1.4 Alokasi Anggaran Kelurahan 2019-2023	10
Tabel 1.5 Jumlah RT dan RW Kelurahan	15
Tabel 1.6 Perbedaan antara <i>analysis of policy</i> dengan <i>analysis for policy</i>	29
Tabel 1.7 Elemen <i>Policy Design</i>	31
Tabel 1.8 Fenomena Penelitian	41
Tabel 1.9 Intepretasi Nilai Korelasi <i>Pearson</i>	49
Tabel 2.1 Jumlah Pendudukan Kab. Pemalang Per Kecamatan 2023	51
Tabel 2.2 Sebaran Kelurahan Kab. Pemalang	55
Tabel 2.3 Ketersediaan Pegawai Kelurahan.....	57
Tabel 3.1 Rincian Alokasi Anggaran Kelurahan menurut APBN dan APBD ...	65
Tabel 3.2 Alokasi Anggaran Kelurahan Kabupaten Pemalang 2023	74
Tabel 3.3 Komponen Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2023	76
Tabel 3.4 Nilai Uji Korelasi Komponen Penyusun Alokasi Anggaran 2023	81
Tabel 3.5 Indeks Komponen Penyusun Alokasi ANgggaran Kelurahan.....	82
Tabel 3.6 Bobot Komponen penyusun alokasi anggaran kelurahan	83
Tabel 3.7 Indeks Kelurahan sebagai komponen <i>redisgn</i>	84
Tabel 3.8 Desain Kebijakan Alokasi Anggaran Kelurahan	85
Tabel 4.1 Hasil lelang eks bondo desa milik kelurahan	95
Tabel 4.2 <i>Redisgn</i> Anggaran Kelurahan Tahun 2023 di Kab. Pemalang	101
Tabel 4.3 Nilai Uji Korelasi Komponen Penyusun terhadap Hasil <i>Redesign</i> .	105
Tabel 4.4 Matrik <i>Policy Desain</i> Sebelum dan Sesudah Redesain.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alokasi Anggaran Kelurahan Kab. Pemalang Tahun 2019-2023....	9
Gambar 1.2 Alokasi Dana Kelurahan Tahun 2023	12
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk per Kelurahan Th. 2023	13
Gambar 1.4 Luas Wilayah per Kelurahan	14
Gambar 1.5 Kerangka Teori	37
Gambar 1.6 Kerangka Pikir.....	38
Gambar 2.1 Peta Administasi Kab. Pemalang	52
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kab. Pemalang Th. 2023	54
Gambar 3.1 Tujuan Kebijakan Berdasarkan Perbup 32/2019.....	60
Gambar 3.2 Mekanisme Alokasi Anggaran Kelurahan 2024.....	66
Gambar 3.3 Tampilan entri anggaran pada SIPD Kemendagri	68
Gambar 3.4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	72
Gambar 3.5 Pengaspalan Jalan Lingkungan	73
Gambar 3.6 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum.....	73
Gambar 3.7 Scatter Plot Jumlah Penduduk dengan Anggaran Kelurahan	77
Gambar 3.8 Scatter Plot Luas Wilayah dengan Anggaran Kelurahan	78
Gambar 3.9 Scatter Plot Jumlah RTRW dengan Anggaran Kelurahan	79
Gambar 3.10 Keterkaitan variabel alokasi anggaran kelurahan.....	80
Gambar 4.1 Scatter Plot Jumlah Penduduk terhadap anggaran redesign.....	102
Gambar 4.2 Scatter Plot Luas Wilayah terhadap anggaran redesign	103
Gambar 4.3 Scatter Plot Jumlah RTRW terhadap anggaran redesign.....	103